

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Masa Depan BPJS: Menilik Visi Misi Kandidat di Pilpres 2019

Pemateri :

1. Sumarjati Arjoso, Skm, anggota DPR RI Fraksi Gerindra
2. Prof. dr. Hasbullah Thabrany, M.PH., Dr.PH., TKN Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Kependudukan Jokowi-Ma'ruf
3. Ah Maftuchan, Executive Director at Perkumpulan Prakarsa (Centre for Welfare Studies)
4. Umi Lutfiah, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute

Moderator : Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik TII

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh sebanyak 32 peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda seperti pemerintah, mahasiswa, media, lembaga riset, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

1. Umi Lutfiah

- 2018 pemberitaan ramai terkait stunting, sebagai contoh kasus di daerah Asmat
- Umi mengaitkan stunting dengan beban BPJS kesehatan
- Defisit 16,5 T dan hasil audit BPKP sebesar 10 T
- 3 misi BPJS sangat terkait, total peserta BPJS sekitar 216 juta jiwa, belum mencapai target nasional.
- Perluasan kepersertaan sangat berpotensi meningkatkan defisit BPJS.
- Visi menjaga kesinambungan finansial akan sulit tercapai ketika persoalan kepersertaan belum diatur dengan baik.
- Salah satu yang menyebabkan deficit BPJS adalah klaim penyakit katastropik seperti penyakit jantung, kanker dan stroke.
- Riskesdas 2018, prevalensi stunting sekitar 30 persen, umi berpendapat indicator ini tergolong sangat tinggi.
- Melalui Universal health coverage harus diarahkan pada upaya promotif dan preventif untuk mengatasi membengkaknya deficit BPJS.
- Wilayah NTT, Papua, Maluku tidak memiliki satu dokter di Puskesmas (Risnakes 2017)
- Upaya yang perlu dibenahi, investasi multisectoral, reformasi kebijakan gaya hidup, gatekeeper 144 penyakit dan UKM 144 penyakit butuh dokter UKM butuh tenaga kesehatan masyarakat.
- Puskesmas di Jakarta justru 80 persen belum memiliki tenaga kerja yang mumpuni.
- UHC dengan URC dan UCC tanpa menghilangkan PHC.

2. Ibu Sumarjati Arjoso

- Tim BPN Prabowo-Sandi, 2019 harusnya seluruh penduduk Indonesia telah tercover BPJS.
- Visi-Misi Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan social merupakan salah satu prioritas yang ingin diperbaiki Prabowo.
- Prabowo-Sandi berkomitmen untuk memperkuat SJSN dan memperjuangkan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan
- Prabowo-Sandi akan memperbaiki tata kelola BPJS kesehatan untuk mencegah deficit dan meningkatkan pelayanan kesehatan
- BPN, berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan dan memastikan penduduk sudah tercover pelayanan kesehatan.
- BPN dalam memperbaiki BPJS kesehatan tetap merujuk pada regulasi UHC dan URC
- BPN, akan tetap menjalankan BPJS sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai dengan UU.
- Kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus tetap dijalankan sebaik-baiknya.
- Dimensi kepersertaan: pemerintah gagal wujudkan UHC.
- Banyak rumah sakit yang tidak lulus akreditasi sehingga diputus mitra dengan BPJS.
- Faskes masih terbatas, banyak keluhan ICU, PICU, NICU dan kamar penuh.
- Di Medan akreditasi Rumah sakit yang lulus sangat sedikit.
- Persoalan kesehatan adalah tanggung jawab dibawah kementerian kesehatan, sedangkan BPJS hanya sebagai penyelenggara saja.
- Tim BPN Prabowo-Sandi, memiliki perhatian penuh terhadap isu stunting. Persoalan stunting adalah factor intelektual.
- Kedepan Tim BPN menawarkan bahwa akan melakukan pembenahan dari manajemen BPJS dan Kementerian Kesehatan. Selain itu, kegiatan audit terhadap rumah sakit dan puskesmas secara berkala.
- Tim BPN Prabowo-Sandi, bertekad untuk terus menjaga keberlangsungannya BPJS serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

3. Prof Hasbullah

- Prof Hasbullah, hampir semua partai politik memiliki visi yang sama bahwa JKN / BPJS harus terus dijalankan. Hal ini didasarkan pada UU yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- BPJS memang memiliki masalah pada implementasi, salah satu faktor karena SDM. Banyak SDM yang tidak mengetahui konsep betul terkait pelayanan kesehatan dan mindset SDM yang masih korup.
- Psslon 01 akan memperbaiki kualitas SDM, hal ini menjawab persoalan pada masih rendahnya kualitas SDM di Indonesia.
- Pembekaan dana BPJS karena belum adanya cost sharing yang terstruktur. Konsep cost sharing belum dipahami betul oleh seluruh laisan masyarkat.

4. Ah Maftuchan

- Maftu menyebutkan apa yang telah dipaparkan Tim BPN 02 sejalan dengan dokumen VISI-MISI pada pilar kesejahteraan yang menyinggung isu pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan SDM yang berkualitas dan isu stunting.
- Maftu memberikan catatan penting terhadap visi-misi 02, pada pilar kesejahteraan yang diturunkan pada program aksi terbilang masih umum dan belum konkrit.
- Meningkatkan iuran peserta mandiri dan iuran BPI belum diuraikan secara jelas.
- Tim BPN 02 sangat frontal menyinggung soal pembangunan infrastruktur 01 yang sangat jor-joran, namun demikian dalam program aksi Paslon 02 justru juga memiliki upaya memperkuat sarana dan prasarana.
- Adanya potensi penggunaan dana kapitasi yang salah digunakan, karena masih tingginya moral hazard di Indonesia.
- Komitmen pemda dan rumah sakit untuk mensukseskan JKN secara sungguh-sungguh masih sangat jauh dari harapan. Kondisi ini direspon dengan tanggapan Prabowo terkait gaji tenaga kesehatan yang masih rendah (gaji dokter lebih rendah dibandingkan gaji tukang parkir).
- Tata kelola BPJS, Maftuchan berpendapat belum menjadi Lembaga kesehatan yang kuat, managerial masih seperti asuransi swasta yang berorientasi pada profit.
- Kemudian, belum ada upaya sungguh-sungguh antar stakeholder yang saat ini masih tumpang tindih.
- Maftu menyinggung bahwa jika dilihat dari visi-misi kedua Paslon, bahwa paslon 01 memiliki visi-misi yang lebih realistis, hal ini terlihat bahwa dalam dokumen visi-misi menyinggung soal prinsip gotong rotong dan perbaiki kualitas SDM.

FORUM DISKUSI

1. Agus Salim

Menanyakan persoalan efektivitas pembiayaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengingatkan pemerintah juga memiliki alokasi dana desa yang jumlah juga cukup besar.

2. Latri

Perpres Nomor 2 tahun 2018 terkait BPJS, dimana pada pasal 52 huruf I terkait system layanan kesehatan yang tidak dapat diklaim BPJS ada sekitar 21. Bagaimana negara / BPJS dapat memberikan jaminan saksi dan korban.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

TERIMA KASIH